

Studi Tematik tentang Etika Politik dan Kepemimpinan Islam (Pendekatan Al-Qur'an dan Hadis)

Gendis Ayu Wulan M¹, Muhammad Alif², Mus'idul Milah³

^{1,2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Alamat: Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Indonesia 4217

Korespondensi penulis : 221370069.gendis@uinbanten.ac.id

Abstract. *This paper discusses the study of politics from an Islamic perspective, which not only examines power and governance but also serves as a foundation for the development of political ethics rooted in the spiritual and moral values of the Qur'an and Hadith. The approach used is a literature review, analyzing relevant texts on Islamic politics, political ethics, and leadership concepts in Islam. In Islam, politics is regarded as a form of worship that must be carried out based on the principles of tawhid (monotheism), justice, shura (consultation), and social responsibility. Concepts such as khalifah (caliphate), shura, and maslahah (public interest) serve as key pillars in the ethical governance system aimed at the welfare of the ummah (community). Furthermore, this paper highlights the importance of political morality (akhlaq siyasah) as a moral foundation for leaders and political actors, while also exploring the distinction between ethics (akhlaq) and morality in the Islamic context. The findings indicate that integrating political studies with Islamic values can create a model of governance that is not only structurally strong but also morally and spiritually elevated. Thus, Islam offers a holistic normative framework for building a just and civilized political system.*

Keyword: *Political Studies, Political Ethics, Islam, Caliphate, Hadits*

Abstrak. Makalah ini membahas tentang studi politik dalam perspektif Islam yang tidak hanya mengkaji kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan pembentukan etika politik yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral Al-Qur'an serta Hadis. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur terkait politik Islam, etika politik, dan konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan dengan prinsip tauhid, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Konsep-konsep seperti khalifah, syura, dan maslahah menjadi pilar dalam tata kelola pemerintahan yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Selain itu, makalah ini menekankan pentingnya akhlak politik sebagai dasar moral bagi para pemimpin dan aktor politik, serta perbedaan antara etika dan akhlak dalam konteks Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara studi politik dan nilai-nilai Islam mampu menciptakan model pemerintahan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga luhur secara moral dan spiritual. Dengan demikian, Islam memberikan kerangka normatif yang holistik dalam membangun sistem politik yang berkeadilan dan beradab.

Kata Kunci: Studi Politik, Etika Politik, Islam, Khalifah, Hadis

1. Pendahuluan

Studi politik adalah salah satu bidang studi yang sangat penting saat masyarakat modern berkembang. Kajian ini menyelidiki berbagai fenomena kekuasaan, kebijakan publik, dinamika pemerintahan, dan hubungan masyarakat-negara. Sejak zaman kuno, politik sebagai aktivitas manusia dalam mengatur kehidupan bersama telah menjadi subjek penelitian yang mendalam. Studi politik terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang kompleks dan multidimensi, mulai dari pemikiran Aristoteles tentang politeia hingga teori-teori modern tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Namun penting untuk diingat bahwa studi

Received: Juni 04, 2025; Revised: Juni 18, 2025; Accepted: Juli 04, 2025; Published: Juli 11, 2025

politik berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan etika politik, yang dapat memberikan pedoman moral bagi masyarakat secara keseluruhan dan para pelaku politik.

Dalam konteks Islam, studi politik memiliki ciri karena terkait erat dengan aspek moral dan spiritual yang merupakan inti dari ajaran agama. Politik dalam perspektif Islam bukan ruang bebas nilai; sebaliknya, itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi di hadapan Allah SWT dan sesama manusia. Studi politik adalah disiplin akademik yang mencakup subdisiplin-subdisiplin yang saling berhubungan dan saling mendukung. Filsafat politik mengkaji pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat negara, legitimasi, kekuasaan, keadilan, dan kebebasan. Ilmu politik (ilmu politik) fokus pada analisis empiris terhadap fenomena politik menggunakan metode ilmiah untuk memahami pola-pola perilaku politik, institusi, dan proses politik.

Teori politik, atau teori politik, adalah upaya untuk membangun kerangka konsep yang memungkinkan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut tentang fenomena politik yang kompleks. Analisis terhadap institusi politik seperti negara, pemerintahan, parlemen, dan sistem hukum adalah bagian dari studi politik. Selain itu, studi politik juga mengkaji aktor-aktor politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemimpin politik, dan warga negara. Studi politik juga memperhatikan proses politik seperti pemilu, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Selama bertahun-tahun, studi politik telah mengintegrasikan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan sebagainya, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang fenomena politik.

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan dalam pemerintahan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab utama dan mengatur masyarakat di negara tersebut. Tapi di tengah politik hanya dirancang untuk mendapatkan kekuasaan formal dalam pemerintahan, sehingga ketimpangan sosial, perlakuan tidak biasa dan sewenang-wenang, serta kejahatan politik lainnya politisi maupun lembaga negara yang mempengaruhi ketimpangan masyarakat. Penyebab terjadinya semua ini dikarenakan kurangnya peran etis dalam politik.¹ Inilah pentingnya nilai-nilai etika Moralitas sebagai dasar politisi dan pejabat pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana mestinya. Dalam etika politik sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, agama, dan Al-Qur'an sebagai rujukan utama kajian nilai-nilai, termasuk nilai-nilai etika dalam politik.

¹ Achmad Dardiri. *Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Al Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama. 2019) hal.1

Prinsip syura menunjukkan bahwa islam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, konsep kemaslahatan (masalah) menjadi tujuan utama kebijakan politik dalam islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Konsep khalifah dalam islam merupakan paradigma kepemimpinan yang unik dan membedakan sistem politik islam dari sistem politik lainnya. Khalifah secara etimologis berarti “pengganti” atau “wakil”, yang dalam konteks politik islam merujuk pada manusia sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola kehidupan bersama sesuai dengan petunjuk-nya. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk pemimpin tertinggi, tapi juga untuk setiap individu yang memiliki tanggung jawab dalam masyarakat. Karakter kepemimpinan khalifah mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, seorang khalifah harus memiliki ketakwaan(taqwa) sebagai landasan spiritual dalam menjalankan tugasnya.

Ketakwaan ini bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga manifestasi dalam bentuk integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan. Kedua, khalifah juga harus memiliki kompetensi (kafa'ah) yang memadai untuk menjalankan tugasnya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman. Ketiga, khalifah juga harus menjalankan prinsip akuntabilitas(muraqabah) naik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat yang dipimpinya. Dalam islam, seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat seperti pada hadis shahih Muslim nomor 3408

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا قَالَ الْكُلُّ كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِي تَهِي
فَالْأُمَيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِي تَهِي وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّ
دِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ الْكُلُّ كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِي تَهِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami **Qutaibah bin Sa'id** telah menceritakan kepada kami **Laits**. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Rumh** telah menceritakan kepada kami **Laits** dari **Nafi'** dari **Ibnu Umar** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah

suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya”⁵

Hadis Shahih Muslim nomor 3408 menjelaskan prinsip tanggung jawab dalam Islam, di mana setiap individu adalah pemimpin (ra'in) dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.⁶ Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang suami atas keluarganya, istri atas rumah dan anak-anaknya, bahkan seorang hamba atas harta majikannya. Hadis ini menekankan bahwa tanggung jawab bukan hanya milik pemimpin negara, tetapi berlaku dalam semua level kehidupan sosial. Dalam konteks politik, hadis ini menjadi dasar pentingnya akuntabilitas moral dan sosial bagi setiap pemimpin. Kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, integritas, dan kesadaran bahwa kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Maka, nilai-nilai ini wajib menjadi dasar etika politik dan tatanegara dalam Islam agar kekuasaan tidak disalah gunakan.

2. METODE

Metode metode yang digunakan dalam makalah ini adalah melakukan analisis umum terhadap beberapa karya literatur politik, termasuk studi tentang pustaka dan politik Islam .yang digunakan dalam makalah ini adalah melakukan analisis umum terhadap beberapa karya literatur politik , termasuk studi tentang pustaka dan politik Islam metode ini melibatkan membaca dan menganalisis berbagai karya literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan buku, jurnal, dan dokumen lain tujuan dari terkait dengan tujuan penelitian. Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam yang digunakan dalam penelitian pustaka adalah pengumpulan data simak atau catat, yaitu pengumpulan data perpustakaan menggunakan buku-buku, literatur, atau bahkan bahan pustaka, yang diikuti dengan analisis dan pembahasan. Penelitian adalah pengumpulan data simak atau catat , yakni pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur, bahkan bahan pustaka yang kemudian dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan. Salah satu teknik analisis data Teknik Analisis Yang dapat digunakan dalam metode penelitian adalah analisis isi atau yang dikenal juga dengan analisis isi. Artinya, teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang

⁵ <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3408> ⁶
Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, no. 3408.

telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menghasilkan hasil yang baik dalam hal analisis atau pengujian hipotesis . Yang dapat digunakan dalam metode penelitian adalah analisis isi atau yang dikenal juga dengan analisis isi . Artinya , teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menghasilkan hasil yang baik dalam hal analisis atau pengujian hipotesis .

3. HASIL PEMBAHASAN

Kajian Etika Politik

Dalam dunia perpolitikan, etika yang baik sangat diperlukan. Untuk menjalankan suatu alur politik yang sangat penting dan beretika. Karena dari suatu proses untuk menjalankan suatu tugas atau mandat, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan maksimal dan tujuan yang telah sudah pernah disepakati bersama .disetujui bersama. Akibatnya, dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, berdasarkan kinerja organisasi yang memberikan kewenangan untuk mendukungnya, etika baik juga berdampak pada kebijakan itu sendiri hasil. Dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, berdasarkan kinerja organisasi yang memberikan kewenangan untuk mendukungnya , etika baik juga mempunyai dampak terhadap kebijakan itu sendiri. Jadi hal - hal kecil dalam dunia politik harus diperhatikan guna menjelaskan suatu keadilan tertentu sebagai manusia yang telah diberi kewenangan dan kekuasaan . dipertimbangkan untuk menjelaskan suatu keadilan sebagai manusia yang telah diberi kewenangan dan kekuasaan. Pengertian etika, secara etimologi kata "etika" berasal dar bahasa yunani yaitu "ethos" yang berarti watak. Yang mana etika juga sudah terbentuk budaya-budaya dan kebiasaan dalam menjalankan keluartugas sehari-hari tugas sehari-hari. Berkat prosedur yang dijalankan secara metodis, maka dapat diketahui etika seseorang yang bercirikan kehidupan pribadinya dan lama - lama sebagai watak . hasil dari prosedur jika dilakukan secara metodis maka dapat diketahui etika seseorang yang ditandai dengan kehidupan pribadi dan lama-lama sebagai watak . Menurut untuk Franz MagnisSuseno (1988) Suseno Etika politik memberikan pedoman, arah, dan dukungan normatif bagi mereka yang ingin membandingkan kualitas kehidupan politik dan tatanan dengan status umat manusia (1988), etika politik memberikan pedoman, arah, dan dukungan normatif bagi mereka yang ingin membandingkan kualitas kehidupan politik dan tatanan dengan status umat manusia. Dalam beretika tolak ukur tolak ukur untuk menimbang suatu etika, didasarkan pada martabat manusia sebagai pendorong terwujudnya etika yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

didasarkan pada martabat manusia sebagai pendorong terwujudnya etika yang dapat diterima masyarakat luas.⁶

Teori tersebut di atas politik yang disebutkan di teori politik merupakan serangkaian prinsip dan pedoman untuk menjalankan proses politik dalam rangka melaksanakan tugas, tantangan, dan pertempuran adalah seperangkat prinsip dan pedoman untuk menjalankan proses politik dalam rangka melaksanakan tugas, tantangan, dan pertempuran. Dapat dikatakan bisa dikatakan bahwa tujuan dari batasan beretika adalah untuk mencegah aktivitas manusia agar tidak terpengaruh oleh konteks penggunaannya . Oleh karena itu, batasan tersebut harus dijaga dan dipatuhi dengan baik agar aktivitas manusia tidak mengganggu batasan tersebut. Tujuan dari Batasan beretika adalah untuk mencegah aktivitas manusia agar tidak terpengaruh oleh konteks penggunaannya. Oleh karena itu, batasan tersebut harus dijaga dan dipatuhi dengan baik agar aktivitas manusia tidak mengganggu batasan tersebut batasan yang disebutkan sebelumnya tersebut didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku dan dipatuhi dalam lingkungan sekitar berdasarkan tentang norma dan nilai yang berlaku dan dipatuhi dalam lingkungan sekitar. Penerapan aplikasi etika politik tidak menyimpang dari tujuan menegakkan hak asasi manusia dan harkat martabat manusia etika politik tidak menyimpang dari tujuan menegakkan hak asasi manusia dan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia, etika politik juga bersumber dari kompas nasional yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai kompas negara bangsa, sekaligus sebagai pedoman hidup masyarakat dalam kompas, aktivitas sehari-hari berdasarkan norma - norma sosial yang baik dan wajar .juga berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan norma sosial yang baik dan wajar . Berhati - hatilah dengan agama agama yang dianut .yang sedang dipraktikkan. serta baik juga petunjuk etika untuk membantu seorang pemimpin menjadi pemimpin hikmat yang bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan .instruksi etika untuk membantu seorang pemimpin menjadi seorang hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam Menjalankan etika politik pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreatifitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Hal ini berkaitan dengan partai politik yang ada. Yaitu politik adalah suatu seni untuk meraih kekuasaan dalam buku Miriam Budiardjo.⁷ Akan tetapi kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Menurut Isjwara (1980) untuk itu mengatur kehidupan politik,

⁶ 1. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 15.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 40.

dengan jalan menjadikan kesusilaan etika sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.⁸

Kajian etika politik didasarkan berdasarkan studi politik prinsip moralitas moralitas politik, yang dikaitkan dengan standar - standar kenegaraan .prinsip-prinsip yang berhubungan dengan standar - standar kenegaraan. Menurut keHegel, Kajian seperti ini berguna untuk membangun bangsa sebagaimana mestinya .Hegel, Kajian seperti ini bermanfaat untuk membangun bangsa sebagaimana mestinya. Etika politik berfungsi sebagai alat alat teoritis untuk memeriksa secara kritis untuk menguji secara kritis dan menegakkan legitimasi politik tanpa menghakimi dan menegakkan legitimasi politik tanpa menghakimi. Dalam artikel tersebut artikel, tidak digunakan emoji, prasangka, dan apriori, melainkan digunakan metodologi ilmiah baku yang disusun secara logis, objektif, dan argumentatif emoji, prasangka, dan apriori tidak digunakan, melainkan menggunakan metodologi ilmiah baku yang bersifat logis, objektif, dan argumentatif .

Tugas etika subsidair politik. Dalam hal ini memperhatikan hal tersebut, hal tersebut penting untuk memastikan bahwa studi tentang masalah teologis dilakukan secara untuk memastikan melalui argumen- argumen yang dapat dipahami itu semua pihak yang terlibat .kajian mengenai masalah teologis dilakukan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Etika politik dengan tolak ukur martabat manusia patokan dan norma penilaian timbal balik politik dan penyelenggaraan nasional. Etika politik tidak tidak menawarkan menawarkan manfaat praktis dan tidak memberikan arahan manfaat praktis tunduk kepada praktisi politik atau pemimpin nasional .dan tidak memberikan arahan yang tunduk kepada praktisi politik atau pemimpin nasional . Etika politik, secara sederhana menempatkan , berguna untuk untuk membawa berbagai teori politik dengan prinsip - prinsip moral berbagai teori politik yang berhubungan dengan prinsip moral. Politik bukanlah bukan etika, etika klaim yang disebutkan di atas harus dikaitkan dengan kurangnya komitmen terhadap kebenaran yang sah, yang sebagian besar tidak terkait dengan ideologi .karena klaim tersebut di atas harus dikaitkan dengan kurangnya komitmen terhadap kebenaran yang sah, yang sebagian besar tidak terkait dengan ideologi .

⁸ 4. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 72.

Etika politik bahkan dapat digunakan sebagai kritik ideologi. Oleh karena itu, etika politik membantu pembangunan dengan memperkuat komitmen untuk mencari kebenaran legitimasi politik secara normatif dan kognitif. Tidak mungkin bagi etika politik untuk menetapkan sistem moral individu, sikap moral, atau norma sebagai dasar negara. Dengan kata lain, mereka tidak membuat standar moral politik dari langit dan hanya bergantung pada rasionalitas. Walau bagaimanapun, etika bermula dari kenyataan, terutama dari perspektif ilmu politik. Komentar tambahan tentang berbagai ide dalam ilmu politik dapat ditemukan dalam etika politik.

Bagaimana etika, sebagai bagian dari filsafat, etika politik mempelajari realitas, misalnya sistem moral, namun tidak dapat, menjadi sistem moral itu sendiri. perlu digaris bawahi bahwasanya etika politik membantu mengejawantahkan sistem moral atau ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik. Misalnya bagaimana pertanggung jawaban, dasar-dasar etik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menjalankan etika politik pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dan perlakuan guna mewujudkan seni dan kreatifitas dalam menjalankan sesuatu kekuasaanya. Akan tetapi kebebasan itu harus pula berdasarkan kesesuaian etika, Menurut Isjwara (1980) untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan menjad kesusilaan etika sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang haru dilakukan dan apa yang wajib di biarkan.⁹

Prinsip-prinsip moralitas politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara adalah subjek utama kajian etika politik. Hegel menyatakan bahwa kajian jenis ini bermanfaat dalam membangun negara yang ideal. Etika politik hanya memiliki teori untuk menguji dan mempertahankan legitimasi politik. Dengan kata lain, mereka tidak mengukur sesuatu berdasarkan perasaan, prasangka, atau apriori; sebaliknya, mereka menggunakan metode ilmiah yang rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik adalah tambahan. Dalam hal ini, membantu menjalankan diskusi tentang ideologi secara objektif dengan menggunakan argumen yang dapat dipahami oleh setiap orang yang memahami masalah tersebut. Etika politik menetapkan standar dan standar untuk menilai kualitas penyelenggaraan politik negara dengan mempertimbangkan martabat manusia. Etika politik tidak bermanfaat secara praktis dan tidak memberikan arahan kepada para praktisi politik atau penyelenggara negara secara subyektif.

⁹ Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 72

Akhlak Politik (Akhlak Siyasi)

Islam memiliki dua sumber pedoman yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah yang menjadi tolak ukur atau pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua sumber ini sekaligus menjadi sumber akhlak islamiyah. Prinsip-prinsip dan kaidah ilmu akhlak islam, semuanya berlandaskan pada wahyu yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individual maupun sosial dalam berinteraksi.

Dalam kitab *Tahdzib Al-Akhlak*, Ibn Miskawaih membahas etika secara sistematis kedalam beberapa tema sentral, yaitu jiwa, kebaikan dan kebahagiaan, keadilan, cinta dan persahabatan serta penyakit dan pengobatan jiwa.¹⁰ pembahasan ini dimaksudkan untuk pendidikan dan pengajaran tentang potensi jiwa manusia. Dalam hidup ini ada dua hal menentukan perbuatan manusia, yaitu nilai baik dan nilai buruk (*good or bad*), betul dan salah (*true and false*). penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksud dengan baik dan buruk, betul atau salah, benar atau palsu itu? Persoalan-persoalan seperti inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Kebutuhan hidup manusia berbeda antara satu individu dengan individu yang lain.

Ada orang yang melihat kebudayaan sebagai hal yang wajib untuk mencapai kebesaran dan kekuasaan, dan ada orang lain yang melihat dunia dengan cara yang lebih zuhud dan sederhana. Perbedaan pendapat inilah yang menghasilkan berbagai jenis pemahaman tentang akhlak. Setelah dipelajari secara menyeluruh, setiap perspektif ini tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan terakhir atau tertinggi yang harus dicapai oleh manusia. Akibatnya, perbedaan itu berasal dari satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Jika perilaku atau perbuatan manusia tidak bertentangan dengan keseimbangan, itu tidak buruk.

Kajian ilmu akhlak membahas masalah-masalah ini, yaitu ilmu yang menerapkan baik dan buruk, dan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam perjalanan hidupnya. Ilmu ini juga berusaha menegakkan apa yang seharusnya dituju oleh manusia dan menggariskan cara mereka dapat mencapainya. Akhlak berfungsi untuk mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Akhlak menilai apa yang patut dan tidak patut dilakukan seseorang, serta apa yang baik dan buruk. Setiap tindakan manusia mempunyai nilai akhlak karena dilakukan secara sadar dan dengan ikhtiar dalam berbagai hubungan, seperti dengan Allah, sesama manusia, alam, diri sendiri, dan sebagainya. Segala tindakan manusia,

¹⁰ Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 55.

baik pribadi maupun sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya, memiliki nilai akhlak yang diambil dan ditanggung jawabkan oleh individu yang terlibat. Nilai moral yang rendah akan mengakibatkan kemiskinan. Para filsuf dan teolog sering berbicara tentang apa itu baik dan buruk, serta bagaimana tindakan tersebut diciptakan. Orang-orang sebenarnya dapat mengambil tindakan baik atau buruk.

Meskipun keduanya mungkin memiliki dampak pada jiwa manusia, Allah memberi tahu manusia terlebih dahulu untuk berperilaku dengan akhlak yang baik karena pada dasarnya manusia cenderung berperilaku baik. Tren ini menunjukkan bahwa konsep-konsep penting tentang moral dan etika tetap sama di setiap zaman dan peradaban. Mereka hanya berbeda dalam cara mereka digunakan dan menguntungkan. Kebohongan, penipuan, atau bahkan keangkuhan tidak dihargai di mana pun di dunia, kecuali di bidang politik. Tidak ada orang yang beranggapan bahwa pengelolaan negara yang baik didasarkan pada perilaku buruk. Sebaliknya, tidak ada orang yang menganggap baik anggota legislatif atau pejabat yang mempunyai kewenangan yang membuat janji manis saat kampanye, tetapi tidak melakukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik ketika mereka menjabat. Tidak ada yang menilai bahwa presiden yang tidak sopan dan berperilaku buruk adalah presiden yang menghormati orang lain. Dalam Al-Qur'an, kebajikan ini disebut sebagai *ma'ruf*, atau suatu gagasan yang dapat diterima oleh banyak orang..¹¹

Dalam bidang politik, para filsuf, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, sejak zaman Yunani kuno hingga pemikir modern, telah banyak berbicara tentang akhlak, atau setidaknya etika, yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, dan bagaimana mereka menghasilkan etika politik atau akhlakus siyasi. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa akhlak yang disebutkan dalam Al Qur'an unik karena keuniversalnya, tanpa membedakan bangsa atau golongan. Dia mengatakan bahwa akhlak ini menyeimbangkan, memberikan hak kepada akal, hati, dan tubuh manusia sebagaimana ia memberikan hak kepada individu dan masyarakat sehingga tidak ada yang zalim.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) hanya kedua orang tuanya (Yahudi), Nasrani, atau Majusi) yang mewujudkannya." Ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Nasrani Untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, kita harus mempertimbangkan aturan Allah. Majusi. Allah. "Berakhlaklah dengan akhlak Allah".

¹¹ Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Bandung: Syirkah Ma'arif. Tth.

Sementara Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW. Ia menjawab. “Budi pekerti Nabi SAW adalah Al Qur'an”. Jika sesuatu dinilai baik oleh Allah, maka itu pasti baik secara substansial. Kebohongan adalah keburukan, jadi tidak mungkin dianggap sebagai kelakuan baik. Selama bertahun-tahun, Rasulullah SAW selalu meminta pengikutnya untuk sebaik mungkin meniru sifat-sifat Allah. Mereka berkata, “Berakhlaklah dengan akhlak Allah”, sementara Aisyah menjawab, “Budi pekerti Nabi SAW adalah Al Qur'an.”

Menjaga keseimbangan akhlak dengan menghargai sifat-sifat Allah, termasuk sifat-Nya yang ramah dan agung, adalah penting. Ketika seorang Muslim mencoba meneladani kekuatan dan kebesaran Allah, mereka harus mengingat bahwa manusia terdiri dari jasad dan roh, yang keduanya harus memiliki kekuatan yang sama. Kebesaran dan kekuatan harus digunakan untuk membantu yang lemah daripada sewenang-wenang atau salah. Oleh karena itu, akhlak harus menjadi pedoman dan melekat pada saat melakukan tugas kepemimpinan dan pelaksanaan pemerintah. Selain itu, seluruh manusia, baik individu maupun masyarakat, harus terus memancarkan akhlak setiap saat. Perilaku administrasi, kepemimpinan, dan keorganisasian harus didasarkan pada prinsip-prinsip akhlak, menurut para pelaku politik dan birokrat pemerintah. Berbeda dengan etika, akhlak memiliki makna yang lebih luas dari sekedar etika karena keduanya fokus pada kelakuan manusia menuju kesempurnaan dan kesucian hidup. Etika terbatas pada tingkah laku lahiriah dan merupakan salah satu aspek penjelmaan hidup kemasyarakatan, muncul dari dan dalam masyarakat, dan bersifat relatif, dan terikat pada ruang dan waktu. Adapun akhlak berkaitan dengan suasana batin ataupun pikiran.¹²

Sumber akhlak adalah ajaran Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW; standar apa yang dianggap baik dan buruk adalah absolut dan berlaku di mana pun dan kapan pun. Di sisi lain, etika adalah hasil dari budaya tertentu, yang dapat berbeda-beda tergantung pada masyarakat yang menghasilkannya. Adat istiadat dan evolusi manusia menyebabkan perbedaan etika yang signifikan. Akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akhlak terhadap Allah hingga terhadap makhluk hidup lainnya, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa seperti alam. Akhlak terhadap Allah dimulai dengan iman, suci, menghormati, mematuhi, dan berserah diri kepada-Nya. Ayat-ayat banyak yang meminta manusia untuk menjadikan Allah sebagai "wakil" atau pelindung mereka. Ketika seseorang memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan suatu hal, orang yang memberikan izin

¹² Ashadi L Diab. 2016. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 2

itu harus melakukan apa yang diberikannya. Menyerahkan segala tanggung jawab kepada Allah berarti menyerahkan semua tanggung jawab kepada-Nya. Dialah yang memiliki otoritas dan bertindak sesuai dengan keinginan manusia, yang kemudian menyerahkan tanggung jawab manusia kepada-Nya. Allah bersifat Rahmat dan Rahim, yang berarti Pengasih dan Penyayang.

4. PENUTUP

Studi politik dalam Islam bukan hanya sekadar kajian tentang kekuasaan dan pemerintahan, melainkan juga merupakan sarana pembentukan etika dan moralitas yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Islam memandang politik sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan prinsip tauhid. Konsep-konsep seperti khalifah (pemimpin sebagai wakil Allah di bumi), syura (musyawarah), dan masalah (kesejahteraan umat) merupakan pilar penting dalam sistem politik Islam yang membedakannya dari sistem politik sekuler. Etika politik dalam Islam menuntut pelaku politik untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Akhlak politik atau akhlak siyasi menjadi pondasi bagi perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, menjadikan pemimpin bukan sekadar penguasa tetapi juga pelayan umat. Akhlak yang baik harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan. Integrasi antara studi politik dan nilai-nilai Islam dapat menciptakan model pemerintahan yang tidak hanya kuat secara struktural tetapi juga luhur secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi para politisi dan pemimpin dalam masyarakat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam setiap aspek kekuasaan dan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (t.t.). *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Bandung: Syirkah Ma'arif.
- Ashadi L. Diab. (2016). Hukum Islam dan ketatanegaraan. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2).
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Dardiri, A. (2019). Etika politik dalam perspektif Al-Qur'an. Al Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama.
- Easton, D. (1965). *A framework for political analysis*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Esposito, J. L. (Ed.). (1995). *The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world*. New York: Oxford University Press.
- Hariantati, R. (2003). Etika politik. *Demokrasi*, II(1).

- Ibn Miskawaih. (1985). *Tahdzib al-Akhlaq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Isjwara. (1980). *Pengantar ilmu politik*. Bandung: Binacipta.
- Magnis-Suseno, F. (1988). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia.
- Maloko, M. T. (2013). *Etika politik dalam Islam*. Makassar: Al-Daulah.
- Muslim bin Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim* (No. 3408).
- Penyusun Kamus, Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarip. (2018). *Pemikiran The King Can Do No Wrong dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).